

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nuklir sudah menjadi faktor yang penting dalam hubungan antar negara sejak perang dunia ke-2 berakhir sampai sekarang. Ledakan bom atom bertenaga nuklir pertama dan kedua di wilayah Jepang mampu mengakhiri dominasi Jepang dan membawa kemenangan bagi sekutu di dunia. Sayangnya, kehadiran nuklir juga membuat keadaan dunia semakin memanas saat krisis nuklir Amerika Serikat (AS) dengan Rusia yang membuat seluruh dunia ketakutan akan kembali pada masa perang kembali atau terjadinya perang dunia ke-3. Sudah tidak mengherankan sebagai negara yang dianggap pemenang perang dan menjadi negara adidaya pasca kehancuran Uni Soviet / Russia pasca dingin, nuklir menjadi hal yang diwaspadai AS demi menjaga pengaruhnya di dunia.

Hubungan AS dengan Iran juga diwarnai oleh isu nuklir, dimana kedua negara ini sempat bekerjasama dalam pengolahan uranium yang notabennya mampu diolah menjadi tenaga nuklir, namun harus berakhir dimana ketakutan AS akan potensi Iran untuk memiliki senjata pemusnah massal berbasis nuklir. Pasca revolusi Iran tahun 1970an, Iran telah bangkit menjadi negara mandiri yang terlepas dari keterlibatan AS pada masa perang dingin sebelumnya, dimana kerjasama Iran dan AS sangat intens di era kepemimpinannya Reza Syah (Iran), namun pasca revolusi tahun 1978 dibawah kepemimpinan Khoemini, Iran memutuskan untuk lepas dari intervensi AS. Selain itu Iran juga menjalin hubungan baik dengan Russia dan China sebagai mitra mereka dalam pengolahan uranium menggantikan AS pada masa perang dingin, sampai pasca perang dingin hubungan Iran dengan Russia dan China makin erat dalam bidang pengolahan nuklirnya. Sampai sekarang, Iran bangkit sebagai negara yang mampu mengolah kekuatan nuklirnya untuk keperluan energi, dengan membuat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan tidak terbukti memiliki senjata pemusnah massal yang selama ini dituduhkan AS.

Timur Tengah menjadi *balance of power* baik dari AS maupun Russia yang menjadi negara satelit atau negara paling berpengaruh selama era Perang Dingin. Kekayaan hasil bumi timur tengah menjadi faktor penentu AS dan Russia berlomba – lomba mengadakan kerjasama dan meluaskan pengaruhnya ke semua negara – negara di timur tengah. Pasalnya, negara di timur tengah memiliki sikap anti-AS yang kuat akibat pengaruh sosial dan kepercayaan, sehingga timur tengah menjadi jalan Russia untuk membuka kerjasamanya dan meluaskan pengaruhnya demi membuat mereka menjadi negara *superpower* satu – satunya. Tidak heran AS terus membawa isu terorisme agar mudah mengintervensi timur tengah agar lebih mudah memasuki timur tengah pasca tragedi WTC 2001, dan terbukti invasi AS ke Iran tahun 2003 lalu Afghanistan 2006 demi mengimbangi pengaruh Russia yang terjalin baik selama perang dingin.

Fenomena sanksi AS yang ditunjukkan untuk Iran tidak bisa dilepaskan dari peran Presiden Iran yang menjabat pada masa itu, yaitu Mahmoud Ahmadinejad. Sejak awal terpilih tahun 2006, ia menyatakan untuk tetap melanjutkan program nuklir Iran sebagai bagian dari kepentingan nasional Iran dengan menyatakan nuklir sebagai tujuan damai (Muzainiyeh, 2016). Keputusan ini disebabkan potensi Iran pada era Ahmadinejad yang memiliki 110 ton uranium fluoroid level, yang mampu diolah sampai level 3.5 % yang meliputi proses sentrifugal uranium 235 sampai level 9%, sehingga Iran hanya memerlukan 25kg dari bahan tersebut untuk membuat bom sebesar bom Hiroshima pada perang dunia kedua (El-Gogary, 2006). Presiden Bush langsung mengajukan persoalan ini ke Dewan Keamanan PBB, dan sanksi dari PBB yang ditunjukkan ke Iran mulai diberlakukan dari tahun 2006 dan terus bertambah sampai tahun 2007. Tidak hanya Amerika Serikat, Uni Eropa ikut memberlakukan sanksi serupa pada akhir kepemimpinan Ahmadinejad, yaitu tahun 2012 berupa embargo minyak sejak bulan Juli 2012.

Timur Tengah menjadi “arena” Amerika Serikat dalam menyebarkan dan meluaskan pengaruhnya, dimana AS bersama – sama sekutunya terlihat aktif mengeluarkan berbagai macam jenis sanksi terhadap Iran (Herianto, 2013). Besarnya pengaruh Amerika Serikat di dunia membuat negara ini terus mengekspansi kekuatannya, untuk mencapai kepentingannya dengan terus menerus melakukan evolusi dalam kebijakan luar negerinya terhadap negara lain. Kekuatan ekonomi dan politik Amerika Serikat membuat Timur Tengah yang menjadi tidak luput dari cengkraman pengaruh AS, terutama Iran yang sempat menjadi partner strategis Amerika Serikat sebelum Revolusi Iran tahun 1970an. Unilateralisme AS terhadap Iran menjadi semakin luas dan menyeluruh mulai dari perang dingin sampai sekarang.

The Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 menjadi kebijakan Amerika Serikat pada era Obama yang mengincar pihak ketiga, baik perusahaan swasta maupun individu yang dianggap berperan dalam program pengembangan nuklir Iran (Yudith, 2017). Penyebabnya tidak lain adalah potensi Iran dalam mengolah program nuklirnya menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat. Hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran pada era kepemimpinan Obama pasca kepemimpinan Bush sedang memasuki kondisi yang tidak stabil. Keadaan dari kedua negara ini tidak bisa dilepaskan dari sanksi Amerika Serikat terhadap Iran yang sangat berpengaruh terhadap pemerintahan Iran secara menyeluruh dan Obama masih melanjutkan kebijakan Bush sebelumnya.

Amerika Serikat yang dipimpin oleh Barrack Obama sebenarnya terkenal sebagai presiden yang mengutamakan kerjasama bilateral dan mengedepankan hubungan diplomatik. Dalam kasus Iran, ciri khas kepemimpinan Obama baru terlihat saat memasuki tahun 2013, dimana pidato Obama di Majelis Umum PBB pada September 2013 menyatakan Amerika Serikat ingin “mencoba” jalur diplomatik

untuk menyelesaikan masalah dengan Iran bersamaan dengan respon baik untuk kepemimpinan Rouhani (Choirul, 2013). Terpilihnya Hassan Rouhani sebagai pemimpin Iran, ikut merubah strategi Iran menjadi lebih terbuka baik ke Amerika Serikat maupun negara-negara barat lainnya bahkan ke seluruh dunia, dimulai dengan pertemuan Iran dengan negara – negara barat di Swiss. Kehadiran Amerika Serikat dalam pertemuan di Swiss tersebut merupakan bukti bahwa Amerika Serikat sendiri ingin menyelesaikan permasalahan program nuklir Iran. Perubahan kebijakan Amerika Serikat dari bentuk sanksi menuju pendekatan diplomatik merupakan hal menarik dimana adanya keinginan dari Amerika Serikat untuk memilih opsi yang sangat menggambarkan gaya khas kepemimpinan Obama yang berbeda dari Bush sebelumnya.

Mulai memasuki tahun 2015, hubungan AS-Iran tengah memasuki sejarah baru dalam menangani potensi nuklir Iran, dimana adanya kesepakatan yang terjalin dalam pengembangan nuklir Iran yang melibatkan AS didalamnya. Fluktuasi hubungan AS dengan Iran selama perang dingin membuat kedua negara berada dalam sebuah hubungan yang tidak kondusif, mengingat berbagai tuduhan sampai sanksi tetap dilancarkan AS terhadap Iran, namun Iran mampu bertahann dengan segala kekuatannya. Kesepakatan *Joint Comperhensive Plan of Action* (JCPOA) disepakati oleh P5 (China, Russia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis) plus Jerman pada tanggal 14 Juli 2015 di Wina (Borger, 2015) menjadi awal baru bagi hubungan Iran dengan negara – negara barat, termasuk Amerika Serikat. Kecurigaan negara - negara barat terutama AS mulai dikesampingkan, dimana timbul keinginan untuk membuat sebuah regulasi bersama dalam masalah ini, saat Iran sudah mulai terbuka dengan melepas paham anti-baratnya diikuti respon positif beberapa negara barat yang bersiap menjadi mitra Iran sendiri. Melalui perjanjian ini, Iran terlihat sedang membangun sebuah kepercayaan global, dimana potensi nuklir Iran seharusnya bisa dipahami oleh semua negara bukan untuk tujuan perang seperti yang selama ini dituduhkan negara – negara barat. Selain itu, pencabutan sanksi dan kerjasama negara – negara anggota perjanjian ini diharapkan mampu memperbaiki hubungan antar negara selama ini.

Secara umum, Iran mengurangi kegiatan produksi uraniumnya serta meningkatkan transparansi proyek nuklirnya meski beberapa proyek di bidang potensial ini ada yang dihentikan, namun sebagai gantinya bantuan internasional dari negara barat (Berlianto, Dapat Restu Parlemen, Iran Siap Jalankan Perjanjian Nuklir, 2015) akan dikirimkan sehingga Iran mampu membangun stabilitas domestiknya. Pasalnya bertubi-tubi sanksi terus menghujam pemerintahan Iran sejak perang dingin, baik dari AS, negara – negara Eropa bahkan sampai organisasi Uni Eropa. Langkah dari kebijakan Iran ini menjadi angin perubahan baru bagi masa depan Iran tidak hanya di Timur Tengah, namun di seluruh regional. Melalui JCPOA, kegiatan nuklir Iran mulai diarahkan menjadi tujuan damai dimana perjanjian ini membatasi setiap potensi penyalahgunaan nuklir yang dianggap berbahaya oleh negara lain.

Setelah 6 bulan berlangsung, Amerika Serikat dengan negara – negara lainnya mencabut sanksi terhadap pengembangan nuklir terhadap Iran pada tanggal 16 Januari 2016 atau 6 bulan setelah kesepakatan JCPOA. Hal ini merupakan dampak dari keputusan PBB yang menyatakan Iran telah mematuhi isi perjanjian JCPOA (Rizal, 2016) secara komperhensif. Artinya, Iran memiliki kesempatan untuk meluaskan kegiatan perekonomiannya lebih luas lagi ke negara barat. Keberhasilan ini membuka peluang Iran menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia mengingat sanksi puluhan tahun masih tidak membatasi eksplorasi kegiatan ekonomi Iran.

Keberhasilan Iran pada awalnya direspon baik oleh Amerika Serikat namun itu tidak berlangsung lama. Pasca satu hari pencabutan sanksi, AS menjatuhkan sanksi baru mengenai program rudal balistik Iran (Hutapea, 2016) dimana sanksi bersifat baru dan tidak ada kaitannya dengan JCPOA sebelumnya. Amerika Serikat kembali menjadi opsi dalam memaksakan kebijakannya demi memenuhi kepentingan nasionalnya dengan memanfaatkan kesempatan dari kebijakan rudal balistik Iran. Sanksi ini menjadi bukti tegas bahwa Iran memang dianggap sebagai ancaman Amerika Serikat melihat peluang negara ini dalam mengolah senjata pemusnah masal sebagai bagian dari program pengembangan nuklirnya pada bulan Januari 2016.

Iran sebagai negara dengan potensi pengembangan nuklir yang sangat potensial di Timur Tengah tetap menyatakan bahwa uji coba rudal balistik ini tidak melanggar baik JCPOA maupun resolusi dewan PBB lainnya dikarenakan tujuan rudal balistik ini untuk senjata konvensional, tidak membawa satu pun unsur nuklir (Saragih, 2017), sehingga secara eksplisit Iran menolak keras indikasi adanya senjata pemusnah masal yang selama ini dituduhkan Amerika Serikat. Perbedaan paham ini kembali membuat ketidakstabilan hubungan AS dengan Iran kembali terjadi ditengah kondisi Iran yang yang memulai terbuka dibawah kepemimpinan Hassan Rhouhani, Amerika Serikat malah tidak menunjukkan sikap positifnya dengan mulai kembali memberi sanksi terhadap Iran. Meskipun pemerintahan era Obama dianggap akan membawa perubahan signifikan terhadap kebijakan Amerika Serikat dari kebijakan yang sangat “otoriter” menuju kebijakan yang “diplomatis”, namun diakhir kepemimpinannya justru mengalami perubahan kembali ke sifat kebijakan AS yang semula.

Penelitian ini akan berfokus pada dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pengembangan program nuklir Iran selama era Obama dari tahun 2010 – 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Apa Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Iran Dalam Merespon Pengembangan Program Nuklir Iran Pada Era Presiden Obama Tahun 2010 – 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Menjelaskan dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai respon atas pengembangan nuklir Iran tahun 2010 sampai 2016

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis mampu menjadi bahan kajian lebih lanjut mengenai Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Iran Dalam Merespon Pengembangan Program Nuklir Iran tahun 2010 - 2016
- b. Secara praktis mampu memberi sumbangan pemikiran untuk pemegang kepentingan baik pemerintahan maupun non-pemerintahan sebagai pertimbangan bagi Indonesia dalam menyikapi respon Amerika Serikat terhadap pengembangan program nuklir Iran pada era kepemimpinan Donald Trump, dengan melihat dinamika Amerika Serikat – Iran sendiri dari tahun 2010 sampai 2016

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

- a. BAB I akan membahas bagian pendahuluan, yang terdiri dari ; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan. Latar belakang akan membahas alasan peneliti memilih topik AS-Iran untuk dijadikan penelitian. Rumusan masalah akan menjawab permasalahan utama yang membuat penelitian ini harus dilakukan. Manfaat penelitian baik secara akademik maupun umum akan dibahas di tujuan dan manfaat, dan diakhiri oleh sistematika penulisan untuk menjelaskan tahap – tahap penulisan dalam penelitian ini.
- b. BAB II membahas bagian tinjauan pustaka, yang terdiri dari ; *literature review*, kerangka pemikiran, alur pemikiran, dan asumsi. *Literature Review* akan membahas penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan maupun memiliki kontribusi terhadap penelitian ini serta membahas perbedaan penelitian ini dengan yang lain. Kerangka pemikiran akan terdiri dari teori dan konsep yang dianggap penulis mampu menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Alur pemikiran akan menggambarkan bagian besar dari penelitian yang akan dijelaskan dalam topic yang diangkat. Ditutup dengan asumsi yang dianggap peneliti merupakan dugaan awal yang peneliti yang dirasa menjadi garis besar penelitian.

- c. BAB III membahas bagian metodologi penelitian, yang terdiri dari ; jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan waktu serta tempat penelitian. Jenis penelitian akan membahas pendekatan dalam penelitian ini. Sumber data akan menjelaskan pembagian data yang akan diperoleh penulis. Teknik pengumpulan data menjelaskan bagaimana peneliti mendapatkan data – data dalam penelitian. Teknik analisis data akan menjabarkan bagaimana penulis mengolah data yang sudah diperoleh. Diakhiri dengan bagaimana penulis membagi waktu dan tempat untuk memperoleh hasil penelitian.
- d. BAB IV akan membahas dinamika dan perkembangan nuklir Iran. Pada bab ini akan dibahas bagaimana kemajuan Iran dalam mengolah tenaga nuklirnya sehingga menjadi hal yang ditakuti negara lain. Respon dari negara – negara bahkan badan internasional seperti Uni Eropa dan PBB akan dibahas disini dimana nuklir Iran masih menjadi perhatian dunia internasional. Dalam beberapa tahun, kesepakatan JCPOA tahun 2015 nuklir Iran berhasil dicapai sehingga Iran berhasil mendapat pengakuan dan dukungan atas program nuklirnya meski Iran harus mengurangi produksinya sampai tingkat tertentu. Meski sudah mendapat pengakuan, Iran membuat langkah kontroversial dengan mengembangkan rudal balistik yang diduga memiliki tenaga nuklir yang dikecam dunia, sehingga Iran tengah bersiap menghadapi tuntutan serta sanksi atas kebijakannya.
- e. BAB V akan membahas analisa kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran. Peneliti akan membahas dinamika dan alasan dibalik perubahan kebijakan AS. Lalu teori kebijakan luar negeri akan membuktikan bagaimana kepentingan AS didalamnya, serta dielaborasi dengan konsep *power politics* yang menjelaskan bagaimana AS menggunakan segala potensinya untuk tetap menguasai nuklir Iran demi kepentingan nasional Amerika Serikat. Di akhir penelitian, akan digambarkan bagaimana besarnya pengaruh AS untuk mempengaruhi kebijakan negara lain, terutama Iran dalam kasus yang akan dibahas peneliti.
- f. BAB VI akan terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini merupakan penutup dari penelitian yang terdiri dari opini disertai hasil penelitian dalam hubungan AS-Iran. Kesimpulan akan menjelaskan garis besar kebijakan AS dalam merespon nuklir Iran. Saran akan terdiri dari bagaimana pemikiran peneliti dalam melihat masa depan hubungan AS-Iran.